

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Hadirnya Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menunjukkan bahwa pemerintah serius dalam upaya memajukan desa. Keseriusan pemerintah untuk memajukan desa tentunya butuh *support* dari seluruh pihak, tujuan pemerintah memajukan serta memperbaiki desa dapat segera terwujud melalui subsidi dana desa. Untuk mendukung suksesnya pengelolaan keuangan desa, kita butuh para kepala desa dan perangkat desa yang memiliki kapasitas baik. Mereka harus mengerti dan paham betul apa isi regulasi tentang desa. Jika tidak, kedepannya pengelolaan keuangan desa akan mengalami masalah serius.

Pemerintah sudah menetapkan alokasi dana per desa rata rata mencapai Rp 960 juta pada tahun 2019, dan pada tahun 2020 ini rata rata per desa menerima anggaran dana desa sebesar Rp 960,59 juta. Secara total pemerintah sudah mengalokasikan dana desa sebesar Rp 71,19 triliun pada tahun 2020 untuk 74.954 desa diseluruh indonesia, jumlah ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya pada tahun 2019 sebesar Rp 70 triliun. Selain adanya perubahan porsi penyaluran, formulasi dana desa juga berubah menjadi beberapa alokasi yaitu menjadi Alokasi Dasar (AD), Alokasi Afirmasi (AA), Alokasi Formula (AF) dan Alokasi Kinerja (AK). Untuk bobot Alokasi Dasar sebesar 69%, Alokasi Afirmasi 1,5%, dan Alokasi Formula 28%, dan Alokasi Kinerja 1,5%. Penyaluran dana desa akan dilakukan tiga tahapan, tahap I sebesar 40% dimulai dari Januari, untuk tahap II sebesar 40% dilakukan dari bulan Maret 2020, dan tahap III sebesar

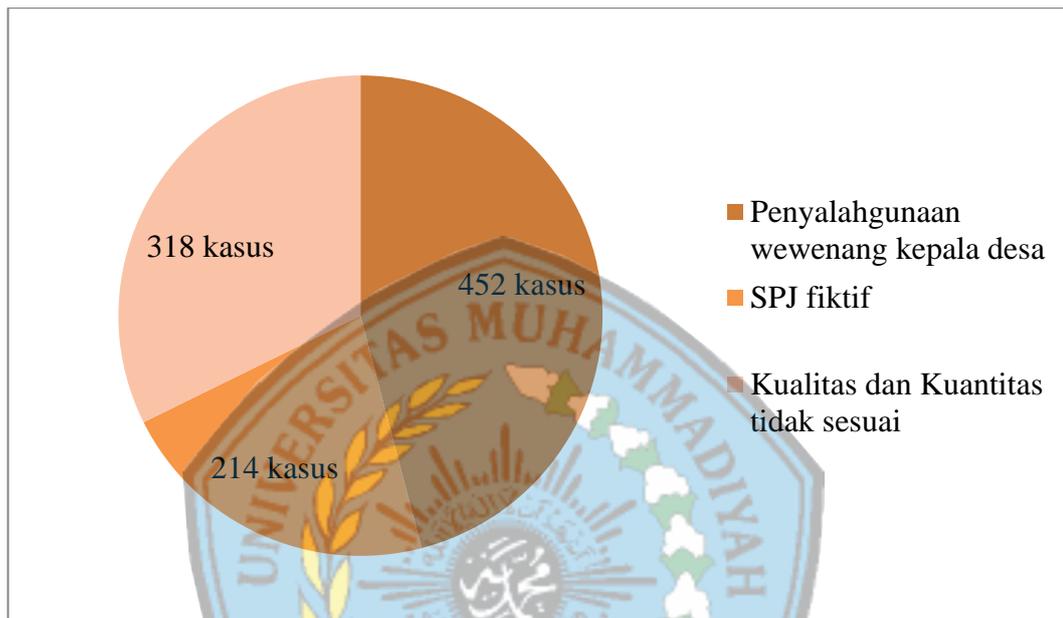
20% paling cepat pada bulan Juli 2020. Untuk Pemerintah Daerah yang baik dan bersetatus mandiri, penyaluran dana desa akan dilakukan dua tahap. Tahap I sebesar 60% dan tahap II sebesar 40%. Tujuannya agar manfaat dana desa dapat langsung dirasakan masyarakat.

Pendapatan dana desa bersumber dari pendapatan asli desa, APBN, bagian dari PDRD Kab/ Kota, alokasi dana desa dari Kab/Kota, bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kab/Kota, hibah dan sumbangan serta pendapatan lain lain desa yang sah. Penggunaan dana desa harus memberikan manfaat sebesar besarnya bagi masyarakat berupa peningkatan kualitas hidup, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi angka kemiskinan, dan peningkatan pelayanan publik.

Sejak meningkatnya anggaran alokasi dana desa, banyak kasus penyalahgunaan dana desa yang terjadi. Pengelolaan dana desa masih diwarnai dengan banyaknya penyelewengan akibat rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM), termasuk aparat desa yang memegang kekuasaan administrasi pemerintahan dan pengelolaan dana desa. *Indonesian Corruption Watch (ICW)* menyatakan bahwa terdapat 27 kasus yang menjerat 29 kepala desa pada tahun 2018. Total kasus yang menjerat kepala desa dalam 4 tahun terakhir terhitung dari tahun 2015-2018 sebanyak 181 kasus serta menjerat 141 kepala desa. Kasus penyelewengan dana desa mengakibatkan kerugian negara yang cukup besar yaitu sebesar Rp 40,6 Milyar (Kompas, 2019)

Hasil pemeriksaan BPK dan kementerian keuangan terdapat beberapa kasus hukum yang terkait dengan dana desa:

Pie Chart 1.1
Kasus Hukum Dana Desa



Sumber : Kementerian keuangan, BPK, 2018

Berdasarkan hasil temuan BPK dan kementerian keuangan terkait kasus hukum dana desa yang terjadi, BPK menemukan adanya masalah pada sumber daya manusia (SDM) yang rendah seperti rendahnya tingkat pendidikan, pelatihan dan pengalaman kerja yang mengakibatkan kurangnya kemampuan perangkat desa dalam membaca, menyusun serta mengelola anggaran.

Pemerintah perlu memprioritaskan pengembangan sumber daya manusia (SDM) di wilayah perdesaan, terutama terhadap kepala desa dan perangkat desa. Cara menyikapi keterbatasan SDM yaitu dengan memperbesar intensitas pelatihan maupun pembinaan kepada perangkat desa. Selain itu pengalaman kerja kepala desa dan perangkat desa juga mempengaruhi bagaimana cara mereka dalam

memahami serta menghasilkan kualitas laporan keuangan yang baik. Pengalaman kerja tidak hanya menyangkut lama masa kerja, tetapi juga memperhitungkan jenis pekerjaan yang pernah dan sering dihadapi. Sejalan dengan bertambahnya pengalaman kerja, maka semakin bertambah pula pengetahuan dan ketrampilan seseorang dalam melaksanakan pekerjaan, serta semakin menunjang kinerja kepala desa dan perangkat desa dalam penyusunan dan menghasilkan kualitas laporan keuangan yang baik.

Laporan keuangan adalah tolak ukur bagi kinerja pemerintahan dalam mengelola sumber daya desa, bukti pertanggungjawaban terhadap keuangan desa, dan menjadi sebuah informasi penting bagi para pengambil keputusan. Dalam mewujudkan laporan keuangan yang baik, maka dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas. Sumber daya manusia seperti kepala desa serta perangkat desa yang memiliki kapasitas baik akan lebih mampu memahami bagaimana cara mengelola keuangan desa dan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas sesuai dengan standar akuntansi keuangan desa.

Rendahnya kualitas sumber daya manusia pada sistem pemerintahan desa seperti rendahnya pendidikan, kurangnya pelatihan dan pengalaman kerja itulah yang memicu munculnya permasalahan pada sistem pengelolaan keuangan desa terutama terhadap kualitas laporan keuangan desa. Merujuk kepada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sukriani, *et al* (2019), Romadhon (2019) dan Darmawan N, *et al* (2017), dan Wungow J, *et al* (2016) mereka sepakat bahwa pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Artinya perangkat desa yang memiliki pendidikan akan menghasilkan laporan

keuangan yang lebih baik dan berkualitas. Pendidikan yang tinggi akan mencerminkan tingkat intelektual seseorang, selain itu pendidikan juga dapat meningkatkan daya saing, dan memperbaiki kinerja sebuah organisasi. Seseorang yang memiliki pendidikan tinggi akan berfikir dan berpengetahuan yang lebih luas. Namun menurut hasil penelitian Budiono V, *et al* (2018) mengatakan bahwa pendidikan berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Artinya pemerintah desa yang memiliki pendidikan mampu membuat laporan keuangan baik namun kualitas laporan keuangan yang dihasilkan tidak sebaik pemerintah daerah yang memiliki pendidikan yang tinggi. Kemudian hasil penelitian yang dilakukan Adiyanto F (2018) menyatakan bahwa pendidikan tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Ini berarti perangkat desa yang memiliki pendidikan belum tentu mampu membuat laporan keuangan desa yang baik dan berkualitas.

Penelitian yang dilakukan Sukriani L, *et al* (2019), Romandhon (2019), Budiono V, *et al* (2018), dan Wungow J, *et al* (2016) menyatakan bahwa variabel pelatihan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Artinya semakin sering perangkat desa melakukan pelatihan maka semakin berkualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Pelatihan merupakan upaya untuk mengembangkan sumber daya manusia, terutama bagi keprbadian manusia dan pengembangan kemampuan intelektual. Pelatihan memiliki orientasi untuk membantu pegawai mencapai keahlian dan kemampuan tertentu agar berhasil dalam melaksanakan pekerjaannya (Rivai 2010).

Penelitian yang dilakukan Wungow J, *et al* (2016), Dermawan N, *et al* (2017),

Adiyanto F (2018), Romandhon (2019), dan Sukriani, *et al* (2019) menyatakan bahwa pengalaman kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Artinya semakin lama masa kerja dan pengalaman kerja seorang perangkat desa akan menghasilkan laporan keuangan yang lebih berkualitas. Seperti yang dikatakan Sulistyani (2004) pengalaman kerja dapat meningkatkan pengetahuan seseorang mengenai teknis maupun keterampilan kerja dengan mengamati orang lain, menirukan serta melakukan tugas-tugas pekerjaan sendiri. Namun penelitian yang dilakukan Budiono V, *et al* (2018), menyatakan bahwa pengalaman kerja tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah. Artinya perangkat desa yang memiliki pengalaman dan masa kerja yang lama belum tentu mampu membuat laporan keuangan yang baik dan berkualitas.

Dari beberapa penelitian terdahulu membuktikan bahwa variabel pendidikan, pelatihan dan pengalaman kerja yang dilakukan masih menyatakan hasil yang tidak konsisten antara berpengaruh positif maupun berpengaruh negatif. Maka perlu adanya pengujian kembali untuk mengetahui pengaruh pendidikan, pelatihan, dan pengalaman kerja perangkat desa terhadap kualitas laporan keuangan desa dengan pengambilan studi empiris di sembilan belas desa di Kecamatan Mranggen, Kab. Demak.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan masalah yang terjadi pada laporan keuangan desa, maka permasalahan yang ingin dibahas dalam penelitian ini di rumuskan dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Apakah pendidikan mempunyai pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan desa pada pemerintah desa di Kecamatan Mranggen ?
2. Apakah pelatihan mempunyai pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan desa pada pemerintah desa di Kecamatan Mranggen?
3. Apakah pengalaman kerja perangkat desa mempunyai pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan desa pada pemerintahan desa di Kecamatan Mranggen ?
4. Apakah pendidikan, pelatihan dan pengalaman kerja perangkat desa mempunyai pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan desa pada pemerintah desa di Kecamatan Mranggen?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menguji pengaruh pendidikan terhadap kualitas laporan keuangan desa pada pemerintah desa di Kecamatan Mranggen.
2. Untuk menguji pengaruh pelatihan terhadap kualitas laporan keuangan desa pada pemerintah desa di Kecamatan Mranggen.
3. Untuk menguji pengaruh pengalaman kerja perangkat desa terhadap kualitas laporan keuangan desa pada pemerintah desa di Kecamatan Mranggen.
4. Untuk menguji pengaruh pendidikan, pelatihan dan pengalaman kerja perangkat desa terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah desa di Kecamatan Mranggen.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Dilihat dari latar belakang masalah, kegunaan atau manfaat penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini menganggap bahwa pentingnya pemahaman seorang kepala desa dan perangkat desa terhadap laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan desa. Jika seorang perangkat desa dapat memahami kualitas keuangan dengan baik, maka perangkat desa mampu mengambil keputusan yang baik. Selain itu kualitas laporan yang baik akan mempermudah pengguna laporan keuangan dalam memahami keadaan keuangan suatu organisasi. Seorang perangkat desa yang mampu memahami laporan keuangan dengan baik akan lebih mudah dalam memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan aktivitas yang ada pada siklus keuangan desa kepada pemerintah dan masyarakat. Sehingga manfaat teoritis penelitian ini untuk mendukung *agency theory* yang menganggap bahwa kepala desa dan perangkat desa sebagai pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yaitu pemerintah dan masyarakat yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberi pemahaman tentang kualitas laporan keuangan terhadap para pengguna laporan keuangan, yaitu perangkat

desa, masyarakat dan pemerintah. Tuntutan pendidikan tinggi, kualitas pelatihan, dan pengalaman kerja yang dibutuhkan perangkat desa guna meningkatkan kinerja pemerintahan desa di kecamatan Mranggen.

3. Manfaat Regulasi

Penelitian ini diharapkan mampu memberi masukan kepada pemerintah desa dalam memahami dan menyajikan kualitas laporan keuangan desa yang baik. Kemudian sebagai bahan referensi bagi para kepala desa dan perangkat desa mengenai beberapa faktor yang mempengaruhi pemahaman serta kualitas laporan keuangan desa.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Menjelaskan tentang landasan teori penelitian, pembahasan penelitian sebelumnya yang sejenis, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Menjelaskan tentang variabel penelitian dan definisi operasional, pemilihan populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV : HASIL DAN ANALISIS

Menjelaskan tentang deskripsi objek penelitian, analisis data, dan pembahasan dari hasil analisis data penelitian.

BAB V : PENUTUP

Berisi kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian.

